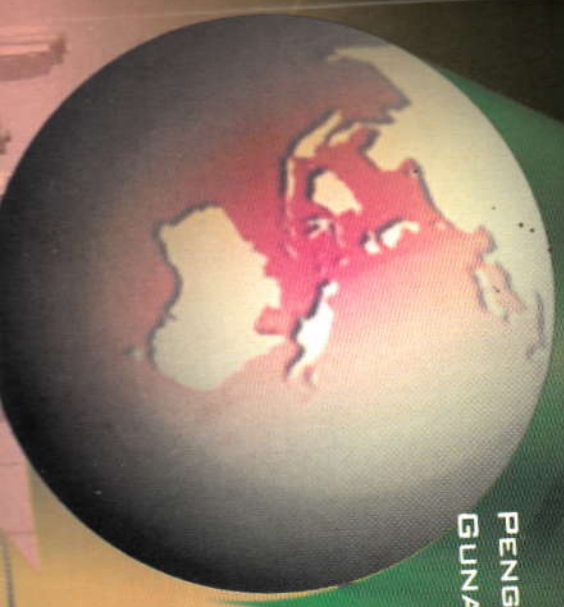


• IWAN NUGROHO
• ROKHMİN DAHURI

Pembangunan Wilayah

Perspektif Ekonomi,
Sosial dan Lingkungan

PENGANTAR
GUNAWAN SUMODININGRAT



LP3ES

• IWAN NUGROHO
• ROKHMİN DAHURI

Pembangunan Wilayah

Perspektif Ekonomi,
Sosial dan Lingkungan

PENGAJARAN:
GUNAWAN SUMODININGRAT

Sanksi Pelanggaran Pasal 72 UU Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Iwan Nugroho

Pembangunan wilayah : Perspektif ekonomi, sosial dan lingkungan/Iwan Nugroho, Rokhmin Dahuri. — Ed. rev., cet. 2. — Jakarta : LP3ES, 2012. xxiv + 432 hal. ; 15,5 x 23 cm.

Bibliografi hal. 398

Indeks

ISBN 978-979-3330-90-7

1. Pembangunan daerah.	1. Judul.	307.14
II. Rokhmin Dahuri.		

Buku ini dipilih sebagai Buku Bermutu oleh Program Pustaka – Yayasan Adikarya Ikapi melalui suatu proses seleksi penilaian kompetitif dan selektif Program Pustaka merupakan program bantuan penerbihan buku-buku bermutu, hasil kerja sama antara Yayasan Adikarya Ikapi dan The Ford Foundation, tetapi Ford Foundation tidak terlibat dalam proses seleksi naskah.

Cetakan kedua (edisi revisi). Agustus 2012
Cetakan pertama, Agustus 2004
Penerbit LP3ES anggota Ikapi
Jl. S. Parman 81, Jakarta 11420. Telp. 021 - 5674211; 56973930
Fax: 021 - 56973930. E-mail: pustaka@lp3es.or.id
Hak cipta © 2004 Iwan Nugroho dan Rokhmin Dahuri
Disunting oleh Untung Yuwono dan Widjanarko S
Desain sampul: Yalya S

Daftar Isi

Daftar Tabel dan Gambar	ix
Kata Pengantar (edisi cetak ulang)	xiii
Kata Pengantar (edisi pertama)	xv
Pengantar: Pembangunan Berbasis Strategi	
Pemberdayaan Masyarakat	
<i>Gunawan Sumodiningrat</i>	xvii
1 Pendahuluan	1
2 Perencanaan Pembangunan Wilayah	7
Pengeritan	8
Perencanaan Pembangunan Wilayah	12
Tahapan Pembangunan Wilayah	13
Instrumen Pembangunan Wilayah	16
Proses Perencanaan Pembangunan Nasional	20
Pengambilan Keputusan atas Dasar Lokasi	24
3 Wilayah Pasar, Sistem Perkotaan dan	
Aglomerasi	28
Wilayah Pasar	28
Hirarki dan Sistem Perkotaan	35
Aplikasi CPT dan Ukuran Wilayah Perkotaan	38
Aglomerasi	44
Analisis Aglomerasi	51
4 Pertumbuhan dan Perkembangan Wilayah	55
Pertumbuhan dan Perkembangan	55

	Pendekatan Empirik (Perspektif Sejarah)	58		Kebijakan Pembangunan Konseptual	193
	Pendekatan Penawaran (<i>supply side approach</i>)	61		Kebijakan Pembangunan Operasional	197
	Pendekatan Permintaan (<i>demand side approach</i>)	63	9	Pembangunan Daerah dan Perdesaan	199
	Analisis Pertumbuhan dan Perkembangan Wilayah	65		Relevansi dan Tujuan	200
	Lampiran 4.1. Kerangka Export Base Theory (Blair, 1991)	77		UU No 5 tahun 1974	203
5	Pembangunan Ekonomi	84		UU No 22 tahun 1999 dan UU 32 tahun 2004	206
	Perspektif Kebijakan Pembangunan	85		Keuangan dan Kemandirian Daerah	209
	Kebijakan Subsidi	92		Program-program Pembangunan Wilayah di Daerah	211
	Program Pembangunan	95		Pembangunan Perdesaan	217
	Isyu Pembangunan Wilayah	99		Strategi dan Kebijakan Pembangunan Perdesaan	222
6	Aliran Komoditi dan Sumberdaya	103	10	Pembangunan Perkotaan	232
	Teori Hecksler dan Ohlin	103		Sejarah dan Mekanisme Pembangunan Perkotaan	233
	Migrasi	107		Studi Perkotaan	238
	Mobilitas Modal (<i>capital mobility</i>)	113		Konsep Aliran Energi	241
	Aliran Gagasan dan Inovasi	115		Pengalaman Empirik	244
	Migrasi di Indonesia	117		Kebijakan Pembangunan Perkotaan	253
	Migrasi di Jabotabek	121			
	Implikasi Sosiologis Migrasi	129	11	Pembangunan Agropolitan	260
	Kebijakan Pembangunan Konseptual	132		Konsep Agropolitan	261
	Kebijakan Pembangunan Operasional	134		Agropolitan di Indonesia	264
7	Penggunaan Lahan	138		Pembangunan Agropolitan Berkelanjutan	270
	Konsep <i>Land Rent</i> dan <i>Land Use</i>	139	12	Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan	276
	Model Klasik (Ricardo dan von Thunen)	141		Batasan dan Karakteristik Wilayah	277
	Model Neoklasik	144		Potensi dan Tingkat Pemanfaatan	284
	Aplikasi dan Pengembangan Model	145		Permasalahan	287
	Konsep Penilaian Lahan dan <i>Public Goods</i>	156		Tantangan	291
	Lahan sebagai <i>Public Goods</i> dan Peran Pemerintah	160		Visi dan Misi	299
	Kebijakan Penggunaan Lahan di Indonesia	163		Kebijakan Pembangunan	302
	Alta Fungsi dan Permasalahan Penggunaan Lahan	168		Lampiran 12.1. Minapolitan di Indonesia	325
	Kebijakan Penggunaan Lahan	174	13	Pembangunan Ekowisata	328
8	Kemiskinan Wilayah	179		Konsep Ekowisata	329
	Konsep Kemiskinan	180		Sejarah Ekowisata	330
	Penyebab Kemiskinan	181		Kelembagaan Ekowisata	334
	Ukuran dan Kriteria Kemiskinan	184		Pengembangan Ekowisata	348
	Kondisi Kemiskinan di Indonesia	189		Lampiran 13.1. Kebijakan Sektoral Pariwisata	349

14	Pembangunan Wilayah Perbatasan	351
	Konsepси Wawasan Nusantara dan Wilayah Perbatasan	352
	Isu Wilayah Perbatasan	356
	Perbatasan Bantam, Bintan dan Karimun	358
	Implikasi Pembangunan Wilayah Perbatasan BBK	364
	Kebijakan Pembangunan Wilayah Perbatasan	368
	Lampiran 14.1. Data Pulau-pulau Terluar	371
15	Agenda Pembangunan Wilayah	382
	Beberapa Fenomena Aktual dalam Pembangunan Wilayah	383
	Agenda Pembangunan Wilayah	391
	Bibliografi	409
	Indeks	422

Daftar Tabel dan Gambar

Tabel		
3.1	Aliran Perdagangan di antara Enam Wilayah	42
3.2	Indeks Standar Perdagangan di antara 6 Area Contoh	43
3.3	Koefisien Spesialisasi Beberapa Provinsi di Pulau Jawa Menggunakan Data PDB tahun 1990	53
4.1	Analisis <i>shift-share</i> Tenaga Kerja Beberapa Sektor di Jawa Timur	67
4.2	Bentuk Dasar Tabel Input-Output	69
4.3	Klasifikasi Sektor dalam SENSE-SDA	75
5.1	Garis Besar Perjalanan Pembangunan Indonesia	87
5.2	Klasifikasi Kebijakan dan Program Subsidi	93
6.1	Peringkat Provinsi Asal dan Tujuan Migran di Pulau Jawa dan Alirannya ke Wilayah Lain di Indonesia Tahun 1995	119
6.2	Peringkat Provinsi di Indonesia Berdasarkan Net Migran Risen yang Masuk Ke dan Keluar dari Pulau Jawa Tahun 1995	121
6.3	Sepuluh Provinsi Tujuan dan Asal Migran dari dan Menuju ke DKI Jakarta dan Jabar Tahun 1995	123
6.4	Peringkat Lima Provinsi Berdasar Net Migran Total dan Risen dari dan Menuju DKI dan Jabar Tahun 1995	125
6.5	Peringkat Provinsi di Indonesia Berdasar Net Migran Risen yang Masuk ke dan Keluar dari DKI Jakarta dan Jawa Barat Tahun 1980 hingga 1995	126
6.6	Rata-rata Upah per Minggu Pekerja Produksi di Bawah Mandor Per Wilayah, Tahun 1996	128
7.1	Kecadaan dan Perkembangan Ring dan Bogota,	155

7.2	Taksonomi Teknik Penilaian Aset Lingkungan (Munasinghe, 1993)	158
7.3	Taksonomi Barang (Cullis and Jones, 1992)	159
8.1	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Provinsi, Maret 2009	190
9.1	PDRB, Penduduk, IPM, Penduduk Miskin per Provinsi	213
9.2	Perkembangan Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan	218
9.3	Kesejahteraan Pendapatan dan Indeks Gini	220
9.4	Indikator Sosial dan Ekonomi pada Pelita IV, V, dan VI	220
9.5	Diagram Logika Pemecahan Permasalahan	230
10.1	Distribusi Penduduk Perkotaan, Perdesaan dan Dunia 1990	237
10.2	Indikator Makroekonomi dan Sosial yang Berhubungan dengan Keadaan Pertumbuhan Perkotaan di Beberapa Negara	245
10.3	Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas Perkotaan yang Menjadi Anggota Organisasi Sosial pada Beberapa Provinsi 1994	252
11.1	Wilayah Agropolitan di Indonesia	269
11.2	Peran Pemerintah dalam Pembangunan Agropolitan	271
11.3	Pengembangan dan Isu Agropolitan	273
12.1	Nilai ICOR Sub Sektor Perikanan Ikan Laut dan Hasil Laut Lainnya	293
12.2	Jumlah Kapal, Luas Usaha Budidaya dan Produksi Perikanan Tahun 2008	312
13.1	Taman Nasional di Indonesia	335
13.2	Produk dan Jasa Ekowisata pada Taman Nasional di Jawa Timur	339
13.3	Klasifikasi Hubungan dan Kebijakan Pariwisata	342
14.1	Prioritas Lokasi Penanganan Wilayah Perbatasan dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) RPJMN 2010-2014	355
14.2	Karakteristik Provinsi Kepulauan Riau	

15.1	Perkembangan Transaksi Internasional	384
15.2	Agenda Pembangunan Wilayah	392
15.3	Pendekatan dalam Pengelolaan Sektor Publik	400

Gambar

2.1	Susunan dan Hirarki Wilayah Nodal	11
2.2	Pilihan Perencanaan Wilayah (Weaver, 2002)	16
2.3	Koordinasi Perencanaan Pembangunan	21
3.1	Struktur Produksi Monopolis, Permintaan Konsumen dan <i>Demand Cone</i>	29
3.2	Kedudukan <i>Average Cost</i> dan Luas Wilayah Pasar	31
3.3	Bentuk Wilayah Pasar Monopolis dan Kompetisi	32
3.4	Hirarki dan Sistem Perkotaan	37
3.5	Titik Batas <i>Hinterland</i> antara Kota A dan B	40
3.6	Kekuatan Interaksi Perdagangan di antara Enam Wilayah	43
3.7	Kekuatan Interaksi Perdagangan di antara Enam Wilayah	44
3.8	Proses Menuju Aglomerasi	50
4.1	Tahapan Perkembangan Sektor Ekspor Dominan (DXS) dalam Wilayah	58
6.1	Segitiga Perdagangan yang Dinikmati Negara Sendiri (kiri) dan Negara Lain (kanan)	104
6.2	Hubungan antara Harga Faktor Produksi dan Harga Komoditi antara Negara Sendiri (kiri, <i>labor intensive</i>) dan Negara Lain kanan, <i>capital intensive</i>)	105
6.3	Hubungan Tingkat <i>Employment</i> dan Upah di Perdesaan dan Perkotaan	110
6.4	Skema Umum Migrasi di Indonesia (Azis, 1994)	117
7.1	Hubungan <i>Land Rent</i> dan Jarak dari Pusat Pasar	142
7.2	Hubungan <i>Land Rent</i> dan Jarak dari Pusat Pasar	143
7.3	Kurva Transformasi dengan Input Produksi Lahan dan Non-Lahan (Richardson, 1978)	144
7.4	<i>Land Rent</i> Lahan Pertanian Menurut Sinclair	146
7.5	Konfigurasi <i>Land Rent</i> Akibat Pengaruh Jalan dan <i>Multiple Market</i> (Blair, 1991)	149
7.6	<i>Rent-bid Curve</i>	150
7.7	Klasifikasi Fungsi Sumberdaya Alam dan Lingkungan (Munasinghe, 1993)	157

7.8	Dinamika Penggunaan Lahan (Nasoetion, 1995)	169
10.1	<i>Sustainability</i> dan Kenaikan <i>Stock Capital</i> per Kapita (Serageldin, 1996)	239
10.2	Model Sederhana Dinamika Sistem Perkotaan	241
10.3	<i>Human Activity Systems</i> (Gayden, 1974)	242
10.4	Rasio Produksi - Respirasi Beberapa Kota	249
10.5	Sebaran Kota di Indonesia (RPJMN 2010-2014)	254
10.6	Faktor yang Signifikan Mempengaruhi Kinerja Usaha (Bappeko Malang, 2007)	257
11.1	Konsep Pengembangan Kawasan Agropolitan	267
11.2	Model Pembangunan Agropolitan	272
12.1	Batasan Wilayah Pesisir dan Lautan (Pernetta and Milliman, 1995)	279
12.2	Keterkaitan Ekologis dan Dampak Pembangunan antara Ekosistem Darat dan Pesisir (dimodifikasi dari ICLARM, 1995)	281
12.3	Kerangka Pendekatan Sistem untuk Kebutuhan Penelitian dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Lautan (Dahuri, 2000b)	314
12.4	Pendekatan Sistem untuk Pengembangan Sektor Pariwisata (disederhanakan dari Sadelle, 2002)	323
13.1	<i>Tourism</i> dan Ekowisata (Wood, 2002)	329
13.2	Struktur kewirausahaan (Nugroho, Nugroho dan Negara, 2009)	346
14.1	Sepuluh Kawasan Perbatasan dan Sebaran 26 Kota Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) (RPJMN 2010-2014)	354
14.2	Kawasan Ekonomi Iskandaria, Johor, Malaysia (Inbox: Semenanjung Malaka)	361
14.3	Wilayah Perbatasan di Kalimantan (GoogleEarth)	365

Kata Pengantar

(Edisi Cetak Ulang)

Penulis sangat bersyukur bisa menyelesaikan buku yang merupakan revisi signifikan dari cetakan pertama, tahun 2004 ini. Paling tidak, selama sepuluh tahun terakhir telah banyak perubahan lingkungan strategis yang ikut mempengaruhi konsepsi pembangunan wilayah. Harus diakui bahwa telah terjadi perubahan mendasar dalam pembangunan dan hasil-hasilnya yang distimulasi oleh otonomi daerah. Di satu sisi, hasil-hasil positif tampak nyata dengan pembangunan dan antispasi terhadap globalisasi. Di sisi lain, masih banyak wilayah lain yang belum menikmati hasil-hasil pembangunan secara optimal, ditunjukkan dengan adanya kemiskinan, ancaman kerusakan lingkungan dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang rendah.

Revisi terhadap terbitan pertama ini dilakukan terhadap materi-materi yang relatif kadaluwarsa atau dalam rangka memperkuat konsep pembangunan wilayah. Penguatan konsep meliputi *entrepreneurship* dan sumber daya manusia (SDM) dalam rangka membangun kapasitas daerah (*building capacity*) untuk menyelenggarakan manajemen publik guna pemberdayaan ekonomi wilayah. Penambahan materi dilakukan untuk memperkaya pengalaman empirik dan implementasi program-program pembangunan wilayah, antara lain Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), agropolitan, minapolitan, ekowisata dan wilayah perbatasan. Revisi dan penambahan materi dilandasi kajian analisis dan pustaka dari publikasi atau pengalaman penulis sebelumnya diperkuat pustaka yang relevan.

Makna pembangunan yang pernah dipikirkan Adam Smith dan Keynes kala itu tentu berbeda dengan *mainstream* ekonomi kesejahteraan Amartya Sen yang menekankan perlunya pembangunan yang inheren dengan kebebasan berpolitik di dalam demokrasi. Dewasa ini, makna pembangunan lebih bersifat komprehensif dan holistik serta cenderung merujuk pada kualitas, seperti tampak dalam buku ini bahwa pembangunan wilayah yang dimaksud bukan hanya dalam arti fisik geografis semata, namun mencakup juga integrasi dari aspek-aspek sosial dan ekonomi, efisiensi mekanisme pasar, dan perbaikan sistem kelembagaan. Seberapapun canggihnya perencanaan pembangunan tanpa dukungan dan partisipasi masyarakat, keberhasilan pembangunan hanya imajinasi belaka. Buku revisi ini menarik, karena di dalamnya memuat kasus Indonesia.



Iwan Nugroho, adalah guru besar pembangunan wilayah, dan Rektor Universitas Widayagama Malang (2011-2015). Selain aktif menulis karya ilmiah yang disajikan dalam jurnal, seminar dan pertemuan ilmiah, dia bisa diajak dialog dengan siapa saja melalui blog <http://widayagama.ac.id/iwan-nugroho/>. Buku lain yang ditulisnya adalah *Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011). Pada tahun 2010, dia menyelesaikan Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 45 Lemhannas dengan predikat Andalan.



Rokhmin Dahuri, adalah guru besar Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan dari Institut Pertanian Bogor (IPB). Dia pernah menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan (2001-2004). Prestasi akademik telah melekat pada dirinya sejak dosen muda. Dia pula salah satu pengagas berdirinya Kementerian Kelautan dan Perikanan. Saat ini, selain aktif mengajar di IPB, juga terlibat dalam pertemuan ilmiah atau perumusan kebijakan pembangunan ekonomi dan penguatan kemiskinan berbasis pembangunan kelautan dan perikanan. Dia sering diundang pemerintah daerah, bahkan ke luar negeri untuk *sharing* pengalaman upaya peningkatan kesejahteraan nelayan, serta pengembangan wilayah pesisir dan industri perikanan.

